

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, penggunaan teknologi internet pada organisasi publik maupun non publik di Indonesia saat ini masih bervariasi. Teknologi internet merupakan wujud dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang dengan pesat dan telah mempengaruhi perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi (Kurniati & Siddi, 2020). Salah satu bentuk pertukaran informasi itu adalah penyampaian laporan keuangan suatu organisasi (atau yang disebut dengan *Internet Financial Reporting*) sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efisien dan cepat untuk diakses (Setiawan & Michael, 2020).

Zadeh & Mahdi Salehi (2018) menjelaskan bahwa pada beberapa tahun terakhir semakin banyak perusahaan yang merancang dan memanfaatkan *website* perusahaan untuk mempublikasikan informasi keuangannya. Sedangkan pada organisasi pemerintah, Sukmadilaga et al. (2019: 90) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi informasi publik, pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki *e-government* sebagai media penyampaian informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban finansial melalui *Internet Financial Reporting* (IFR) untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada semua *stakeholder* publik yang terdiri atas pemerintah

pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan masyarakat.

Dalam konteks teori keagenan, pemerintah daerah merupakan agen karena menyelenggarakan tanggung jawab pemerintahan sesuai dengan segala kepentingan masyarakat selaku prinsipal (Kurniawan & Scorpianti, 2019). Pemerintah daerah diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan dan mengelola pemerintahan dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan informasi mengenai pengelolaan daerah kepada masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerahnya sehingga mampu mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di lingkungan pemerintahan, laporan keuangan melalui internet sepertinya kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah di Indonesia. Verawaty (2015) mengemukakan adanya kesenjangan antara praktik keterbukaan informasi keuangan melalui *e-government* dengan banyaknya pemerintah daerah yang belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Teknologi internet belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan (Saraswati et al., 2019). Kurangnya perhatian mengenai pelaporan keuangan pada *website* pemerintahan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan

masyarakat, menjelaskan bahwa sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. Bentuk transparansi informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Transparansi tersebut diperlukan guna menghindari adanya tindak manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam penyajian informasi kepada publik (Kurniawan & Scorpianti, 2019).

Transparansi informasi keuangan pemerintah daerah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188/52/1797/SJ tahun 2012 yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* terkait. Dokumen keuangan yang disebutkan dalam instruksi tersebut antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD.

Penerapan *Internet Financial Reporting* diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang pada saat ini tengah menjadi perhatian khusus para *stakeholder* pemerintah serta untuk menciptakan *good governance & clean*

governance (Putra & Syofyan, 2020). Sekretaris Nasional FITRA (2020) merilis Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget Survey*) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2019 mendapat skor 70 dari 100 poin (<https://seknasfitra.org>). Namun faktanya berdasar laporan *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 Negara Indonesia justru menduduki peringkat 102 atas 180 negara yang diuji (<http://www.transparency.org>). Kondisi ini menunjukkan masih diperlukannya upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangannya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik (Khasanah et al., 2017) .

Di samping itu, data APJII 2020 menyatakan jumlah pengguna internet yang terdapat di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020 yakni sebanyak 26,3 juta orang. Angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di Jawa Timur menyebabkan tingginya tekanan masyarakat akan pengungkapan informasi keuangan melalui internet. Akan tetapi, menurut koordinator Forum Transparansi Pengelolaan Anggaran (FITRA) Jawa Timur A. Dahlan, “Kendati sudah lama diberlakukan, sejumlah daerah belum mematuhi instruksi tersebut (publikasi laporan keuangan pemerintah daerah).” Fakta tersebut diperkuat dengan ditemukannya beberapa daerah terbukti belum mempublikasikan dokumen keuangan di laman *website* masing-masing pemda (www.kumparan.com).

Tabel 1. 1
Penerapan *Internet Financial Reporting* di *Website* Resmi
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015-2019

No	Pemerintah Daerah	Daerah Otonom	Tidak Memiliki Website	Praktik <i>Internet Financial Reporting</i>				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kota	9	-	4	4	4	4	4
2.	Kabupaten	29	-	7	12	10	13	15
	Jumlah	38	-	11	16	14	17	19
	Persentase	100%		28.9%	42.1%	36.8%	44.7%	50%
	Rata-rata			45.8%				

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2021 (tabel 1.1) dapat diketahui persentase pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang mempraktikkan *Internet Financial Reporting* pada *website* resminya adalah sebesar 28.95% pada tahun 2015, 42.1% pada tahun 2016, 36.8% pada tahun 2017, 44.7% pada tahun 2018, dan 50% pada tahun 2019. Kesimpulannya, persentase rata-rata praktik *Internet Financial Reporting* pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2019 masih sebanyak 45.8%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kurang dari setengah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur masih belum bersifat transparan atas laporan keuangannya kepada masyarakat.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah. Mutiha (2017) meneliti bahwa pendapatan asli daerah suatu pemerintah daerah memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting*. Sedangkan Azis & Hapsari (2020) dan Hadianto & Murtin (2020) menemukan bahwa ukuran suatu pemerintah daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap praktik *Internet Financial Reporting*. Selain itu, opini audit juga memiliki pengaruh

terhadap praktik *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah (Pontoh et al., 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menggali bukti empiris tentang beberapa faktor yang menjadi pengaruh atas pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian Wijaya et al., (2020) mengenai pengaruh opini audit dan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadianto & Murtin (2020) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda.

Dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Azis & Hapsari (2020) yang berjudul "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting* (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018)", dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menambahkan variabel opini audit.

Yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah karena adanya ketimpangan antara banyaknya pengguna internet khususnya di wilayah

Jawa Timur dengan praktik *Internet Financial Reporting* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur yang masih belum menyeluruh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah tidak menerapkan *Internet Financial Reporting* di *website* resminya. Selain itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet masih jarang diteliti pada lingkup pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menambah literatur tentang pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah” (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah berengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh opini audit berengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Pemerintah Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah melalui media internet atau yang disebut dengan *Internet Financial Reporting* serta memberi kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi keuangan di situs resmi pemerintahan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan dapat mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui media internet. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam

mengakses laporan keuangan guna mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai transparansi laporan keuangan pada lembaga pemerintahan serta memperkaya informasi dan literatur yang berkaitan dengan penerapan *Internet Financial Reporting* beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, masukan, dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah.

5. Bagi Universitas

Mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur serta dapat meningkatkan reputasi kampus dari penelitian yang dilakukan.

